



Kekuatan Kepemimpinan Instruksional Kepala Sekolah dalam Mengkoordinasikan Pendidikan Inklusif

Rismita^{1✉}, Connie Chairunnisa², Istaryatiningtias³, Yoga Dwiputra⁴

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Indonesia^{1,2,3,4}

e-mail : rismita@uhamka.ac.id¹, zusconnie@uhamka.ac.id², iis_ningtias@uhamka.ac.id³, yogadwiputra241078@gmail.com⁴

Abstrak

Tantangan yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman tentang pendidikan inklusif dan keterbatasan sumber daya (guru pendamping khusus). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran dan kekuatan kepemimpinan kepala sekolah dalam mengkoordinasikan program pendidikan inklusif. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (pimpinan sekolah, guru, dan staf pendukung), observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis tematik dengan menganalisis, dan menentukan pola untuk mengidentifikasi topik penelitian. Hasil penelitian adalah kepala sekolah mempunyai keterampilan komunikasi yang baik dan mampu membangun tim dengan para guru dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif walau tidak adanya guru pendamping khusus, hal ini dapat diatasi dengan kepemimpinan yang kuat. Kepala sekolah menyediakan sumber daya dan pelatihan bagi guru terhadap pendidikan inklusif. Kepala sekolah menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif memfasilitasi partisipasi dari semua pihak terkait untuk mengakomodasi siswa dengan kebutuhan belajar yang beragam dan perilaku yang kompleks dalam kelas, siswa inklusif mendapatkan dukungan dan kesempatan yang tepat untuk berhasil. Kepala sekolah berperan penting dalam meningkatkan kualitas pengajaran melalui dukungan, kolaborasi, umpan balik, dan pengembangan profesional. Kesimpulan/implikasi adalah kepemimpinan instruksional yang efektif merupakan kunci utama dalam mengkoordinasikan pendidikan inklusif untuk mencapai keberhasilan, sehingga diperlukan pelatihan kepemimpinan instruksional yang berfokus pada pendidikan inklusif.

Kata Kunci: Kepemimpinan Instruksional; Pendidikan Inklusif; Peran Kepala Sekolah

Abstract

The challenges faced are the lack of understanding of inclusive education and limited resources (special assistant teachers). The purpose of this study was to analyze the role and strength of the principal's leadership in coordinating inclusive education programs. The research method used is descriptive qualitative. Data collection was carried out through interviews (school leaders, teachers, and support staff), observation, and documentation. Data analysis used thematic analysis by analyzing and determining patterns to identify research topics. The results of the study are that the principal has good communication skills and is able to build a team with teachers in implementing inclusive education even though there is no special assistant teacher, this can be overcome with strong leadership. The principal provides resources and training for teachers on inclusive education. The principal creates an inclusive school environment that facilitates participation from all stakeholders to accommodate students with diverse learning needs and complex behaviors in the classroom, inclusive students get the right support and opportunities to succeed. The principal plays an important role in improving the quality of teaching through support, collaboration, feedback, and professional development. The conclusion/implication is that effective instructional leadership is the main key in coordinating inclusive education to achieve success, so instructional leadership training that focuses on inclusive education is needed.

Keywords: Instructional Leadership; Inclusive Education; Principal Role

PENDAHULUAN

Kepemimpinan instruksional adalah suatu proses yang dilaksanakan oleh kepala sekolah untuk meningkatkan kegiatan pengajaran dan pembelajaran murid di sekolah melalui pengelolaan yang efektif, membimbing pembelajaran guru, serta mengembangkan pembelajaran dengan mengadakan perkumpulan organisasi sekolah atau sekolah komunitas (Brazer & Bauer, 2013). Hal senada diungkapkan oleh Hallinger bahwa “kepemimpinan instruksional menekankan pada tanggung jawab kepala sekolah dalam mengembangkan visi pendidikan, mengelola program instruksional, dan menciptakan iklim yang mendukung pembelajaran yang efektif serta focus pada pembelajaran siswa dan mendukung guru dalam peningkatan praktik mengajar melalui pembinaan dan umpan balik yang berkelanjutan yang diterapkan di lingkungan sekolah” (Hallinger, 2018). Berdasarkan pendapat para ahli di atas, kepala sekolah sebaiknya fokus untuk menatalaksanakan kegiatan pembelajaran guru dalam memenuhi berbagai kebutuhan siswa (reguler dan inklusif), melakukan supervisi atau memantau kegiatan pengajaran guru untuk memastikan dalam mencapai hasil pembelajaran siswa yang telah ditetapkan pada visi, misi, dan tujuan sekolah, serta juga dengan melibatkan kompetensi pedagogik guru dalam pengajaran di kelas.

Berdasarkan fokus yang diuraikan di atas, kekuatan kepemimpinan instruksional kepala sekolah mengarah pada pengajaran dan pembelajaran guru dalam membina kemahiran instruksional guru dalam mengajar yang membantu untuk menentukan arah pencapaian pendidikan yang berkualitas dalam reformasi pengajaran (Widiyan, Sirisooksilp, & Narot, 2020). Dalam membahas peran progresif kepala sekolah ke arah kemajuan dan perbaikan pendidikan terutama mengenai pendidikan inklusif, seorang pemimpin sekolah memerlukan pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai aspek dan fungsi kepemimpinan instruksional yang mengacu pada Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 yang menyatakan bahwa pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya (Kemendikbudristek, 2022). Penyelenggaraan pendidikan di SD Negeri Cikampek Pusaka I disesuaikan dengan Permendiknas di atas. SD Negeri Cikampek Pusaka I merupakan sekolah penggerak yang sudah menerapkan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) yang bertujuan untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk proses penguatan karakter (Jaya, 2023). Namun dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri Cikampek Pusaka I tidak mempunyai guru pendamping khusus dalam menangani siswa ABK dengan rincian sebagai berikut: kelas 1A (Tuna wicara), kelas 4A terdapat dua orang siswa ABK (autism dan slow learner), kelas 4B (Tuna wicara), kelas 5A (Disgrafia), dan kelas 5B (disabilitas fisik penyebab kecelakaan). Menanggapi masalah tidak adanya guru pendamping khusus untuk pendidikan inklusif di sekolah, maka perlunya kekuatan kepemimpinan instruksional kepala sekolah dalam menangani proses pembelajaran di sekolah dengan menyoroti focus pada keterampilan individu dengan menekankan pendidikan dan pengembangan berkualitas bagi anak-anak dengan beragam kemampuan dan kebutuhan dengan rasa tanggungjawab atas bidang dan disiplin ilmu dalam kurikulum sekolah dan gagasan mengenai pendidikan inklusif, berakar pada dimensi sosial-politik, yang menyatakan bahwa inklusi adalah masalah hak asasi manusia (Kaur, Noman, & Awang-Hashim, 2016).

Kepala sekolah sebagai kepemimpinan instruksional merupakan komponen penting dalam menentukan kualitas sekolah, dengan maksud bahwa kepala sekolah yang menerapkan kepemimpinan instruksional berfokus pada peningkatan pendidikan yang menekankan pada aspek pembelajaran, membangun kerjasama, analisa hasil pencapaian siswa (reguler dan inklusif), pengembangan guru, dan penyesuaian kurikulum” (Sunardi, Nugroho, & Setiawan, 2019).

Permasalahan umum mengenai pendidikan inklusif berdasarkan penelitian terkait, menyatakan bahwa masalah yang dihadapi guru dalam pendidikan inklusif adalah (1) kurangnya jumlah guru pendamping khusus

yang membantu dalam menangani anak berkebutuhan khusus, (2) kurangnya pengetahuan guru terkait pendidikan inklusif, dan (3) guru merasa kesulitan menghadapi siswa kebutuhan khusus (Musneckiene, 2020). Selanjutnya masalah terkait pendidikan inklusif adalah guru belum memiliki pengetahuan atau keterampilan yang mumpuni dalam menangani siswa inklusif dalam arti masih belum sensitive dan proaktif terhadap siswa berkebutuhan khusus (Ramadhana, 2024) dan penelitian lain menyatakan bahwa kompetensi tenaga pendidik masih rendah dalam mengembangkan kurikulum inklusif (Sumarni, 2019). Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti melakukan penelitian mengenai kekuatan kepemimpinan kepala sekolah dalam pendidikan inklusif yang bertujuan untuk memahami bagaimana pemimpin pendidikan, seperti kepala sekolah atau koordinator inklusi, dapat memfasilitasi lingkungan belajar yang mendukung semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus. Dalam hal ini kepala sekolah mengadakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang ada di sekolah dalam mencapai keselarasan dan keseimbangan pendidikan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yaitu dengan mengamati secara mendalam sekolah yang berhasil dalam menerapkan model kepemimpinan instruksional yang efektif mengenai pendidikan inklusif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepala sekolah sebagai koordinator mengenai praktik kepemimpinan instruksional dalam menerapkan pendidikan inklusif dengan memfasilitasi lingkungan belajar yang mendorong semua peserta didik (reguler dan kebutuhan khusus), dan penelitian kepemimpinan instruksional dalam pendidikan inklusif untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi, serta menyediakan dasar bagi pengembangan kebijakan dan program. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (pemimpin sekolah, guru, dan staf pendukung untuk memahami pengalaman dan strategi yang digunakan dalam mendukung pendidikan inklusif), observasi (mengamati interaksi antara pemimpin kepala sekolah dan guru, antara guru dan siswa di lingkungan inklusif. Analisis data menggunakan analisis tematik dengan menganalisis, dan menentukan tema atau pola untuk mengidentifikasi topik (Braun & Clarke, 2006), yang berkaitan dengan kepemimpinan instruksional dan dikonseptualisasikan agar saling terkait satu sama lain dari data yang terkumpul. Langkah-langkah desain penelitian kualitatif adalah (1) merumuskan tujuan spesifik dan pertanyaan penelitian, (2) pengembangan instrument penelitian dengan membuat pedoman wawancara, (3) menentukan informan penelitian, (4) pengumpulan data sesuai dengan metode, (5) menganalisis data dengan tematik analisis, dan (6) menginterpretasikan hasil temuan penelitian dalam konteks pendidikan inklusif dan kepemimpinan instruksional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data Tenaga Pendidik

No	Jabatan	Status pegawai		Jumlah
		Guru PNS	GTT (Honor)	
1.	Kepala sekolah	1		1
2.	Guru kelas	9	3	12
3.	Guru agama	1	0	1
4.	Guru Penjas	0	2	2
5.	Guru SBK	1	0	1
6.	Guru Inklusi	0	0	0
Jumlah		12	5	17

Data pada tabel 1 di atas, merupakan ringkasan data tenaga pendidik di SD Negeri Cikampek Pusaka I yang menunjukkan jumlah tenaga pendidik dalam berbagai peran untuk mengelola dan mengkoordinasikan pembelajaran yang dikelompokkan berdasarkan kategori kepegawaian yang terdiri dari: PNS (Pegawai Negeri Sipil/PNS), GTT (Guru Tidak Tetap/honorar).

Berikut hasil intepretasi data: 1. Kepala Sekolah (terdapat seorang kepala sekolah yang berstatus PNS, dan tidak ada kepala sekolah yang berstatus honorar), 2. Guru Kelas (terdapat 9 guru kelas yang berstatus PNS dan terdapat 3 guru kelas yang berstatus honorar, jumlah semua guru kelas adalah 12 orang guru), 3. Guru Agama (terdapat 1 guru agama yang berstatus PNS, dan tidak guru agama yang berstatus honorar, total guru agama berjumlah 1 orang guru), 4. Guru Pendidikan Jasmani/PJOK (tidak ada guru penjas yang berstatus PNS, terdapat 2 guru penjas yang berstatus honorar, total guru penjas berjumlah 2 orang), 5. Guru SBK (terdapat 1 guru SBK yang berstatus PNS, tidak ada guru SBK yang berstatus honorar, dan total guru SBK berjumlah 1 orang, dan 6. Guru Inklusi (tidak ada guru inklusi yang berstatus PNS maupun honorar). Jadi, kesimpulannya untuk tabel 1 adalah terdapat 12 guru PNS dan 5 guru honorar di SD Negeri Cikampek Pusaka I, yang berjumlah secara keseluruhan guru dalam semua peran adalah sebanyak 17 orang.

Tabel 2. Jumlah Siswa Berdasarkan Tingkat Kelas dan Jenis Kelamin

No	Nama Rombel	Tingkat Kelas	Jumlah Siswa		
			L	P	Total
1	Kelas 1A	1	19	16	35
2	Kelas 1B	1	19	15	34
3	Kelas 1C	1	17	17	34
4	Kelas 2A	2	15	18	33
5	Kelas 2B	2	15	21	36
6	Kelas 2C	2	10	20	30
7	Kelas 3A	3	23	22	45
8	Kelas 3B	3	22	18	40
9	Kelas 4A	4	21	20	41
10	Kelas 4B	4	21	23	44
11	Kelas 5A	5	20	17	37
12	Kelas 5B	5	26	10	36
13	Kelas 5C	5	15	15	30
14	Kelas 6A	6	20	14	34
15	Kelas 6B	6	17	18	35
16	Kelas 6C	6	17	14	31
Total			297	277	574

Data pada tabel 2 di atas, menunjukkan jumlah siswa di sekolah, yang dikelompokkan berdasarkan tingkat kelas dan rombongan belajar (rombel). Berikut adalah interpretasi dari data tersebut: **1. Tingkat kelas 1** : (kelas 1A = Laki-laki berjumlah 19 siswa, dan Perempuan berjumlah 16 siswa, jumlah keseluruhan sebanyak 35 siswa), (kelas 1B= Laki-laki berjumlah 19 siswa, dan Perempuan berjumlah 15 siswa, jumlah keseluruhan sebanyak 34 siswa), dan (kelas 1C= Laki-laki berjumlah 17 siswa, dan Perempuan berjumlah 17 siswa, jumlah keseluruhan sebanyak 34 siswa); **2. Tingkat kelas 2**: (kelas 2A= Laki-laki berjumlah 15 siswa, dan Perempuan berjumlah 18 siswa, jumlah keseluruhan sebanyak 33 siswa), (kelas 2B= Laki-laki berjumlah 15 siswa, dan Perempuan berjumlah 21 siswa, jumlah keseluruhan sebanyak 36 siswa), dan (kelas 2C= Laki-laki berjumlah 10 siswa, dan Perempuan berjumlah 20 siswa, jumlah keseluruhan sebanyak 30 siswa), **3. Tingkat kelas 3** : (kelas 3A= Laki-laki berjumlah 23 siswa, dan Perempuan berjumlah 22 siswa, jumlah

keseluruhan sebanyak 45 siswa), dan (kelas 3B= Laki-laki berjumlah 22 siswa, dan Perempuan berjumlah 18 siswa, jumlah keseluruhan sebanyak 40 siswa), **4. Tingkat kelas 4:** (kelas 4A= Laki-laki berjumlah 21 siswa, dan Perempuan berjumlah 20 siswa, jumlah keseluruhan sebanyak 41 siswa), dan (kelas 4B= Laki-laki berjumlah 21 siswa, dan Perempuan berjumlah 23 siswa, jumlah keseluruhan sebanyak 44 siswa), **5. Tingkat kelas 5:** (kelas 5A= Laki-laki berjumlah 20 siswa, dan Perempuan berjumlah 17 siswa, jumlah keseluruhan sebanyak 37 siswa), dan (kelas 5B= Laki-laki berjumlah 26 siswa, dan Perempuan berjumlah 10 siswa, jumlah keseluruhan sebanyak 36 siswa), dan kelas 5C= Laki-laki berjumlah 15 siswa, dan Perempuan berjumlah 15 siswa, jumlah keseluruhan sebanyak 30 siswa), dan **6. Tingkat kelas 6:** (kelas 6A= Laki-laki berjumlah 20 siswa, dan Perempuan berjumlah 14 siswa, jumlah keseluruhan sebanyak 34 siswa), (kelas 6B= Laki-laki berjumlah 17 siswa, dan Perempuan berjumlah 18 siswa, jumlah keseluruhan sebanyak 35 siswa), dan (kelas 6C= Laki-laki berjumlah 17 siswa, dan Perempuan berjumlah 14 siswa, jumlah keseluruhan sebanyak 31 siswa). Jadi, kesimpulan untuk data siswa berdasarkan tingkat kelas dan jenis kelamin secara keseluruhan adalah sebagai berikut: jumlah total siswa Laki-laki berjumlah 297, jumlah total siswa perempuan berjumlah 277, dan total keseluruhan adalah sebanyak 574. Termasuk dalam kategori ini adalah siswa berkebutuhan khusus, dengan rincian sebagai berikut: 1. Natasya Aulia Santika (5A/Perempuan) = Disgrafia = Karawang, 18 Desember 2011; 2. Reisy Febriyani Putri (1A/Perempuan) = Tuna wicara = Karawang 23 Februari 2015; 3. Muhamad Kamil Mustofa (4A/Laki-laki) = autism - karawang 18 April 2013; 4. Nisa Halimatussadiyah (4A/Perempuan) = slow learner= karawang, 19 Januari 2013; 5. Hanif Alfian Mubarak (5B/Laki-laki)= disabilitas fisik penyebab kecelakaan= 07 Februari 2013; dan 6. Asep Mulyana (4B.Laki-laki) = Tuna Wicara = 24 Maret 2013.

Tabel 3. Jumlah Siswa Berdasarkan Golongan Usia

Usia	L	P	Total
< 6 tahun	0	0	0
6 - 12 tahun	287	270	557
13 - 15 tahun	10	7	17
16 - 20 tahun	0	0	0
> 20 tahun	0	0	0
Total	297	277	574

Data tersebut menunjukkan distribusi usia siswa di sekolah, yang dikategorikan berdasarkan jenis kelamin. Berikut adalah interpretasi dari data tersebut: 1. ...< 6 Tahun : Laki-laki (L): 0, Perempuan (P): 0, Total: 0, 2. 6 - 12 Tahun: L: 287, P: 270, Total: 557, 3. 13 - 15 Tahun: L: 10, P: 7, Total: 17, 4. 16 - 20 Tahun: L: 0, P: 0, Total: 0, 5. ...> 20 Tahun: L: 0, P: 0, Total: 0. Jadi, kesimpulan pada data ini adalah Jumlah total siswa laki-laki: 297, Jumlah total siswa perempuan: 277, dan Jumlah total siswa keseluruhan: 574.

Temuan penelitian berdasarkan hasil wawancara mengenai kekuatan kepemimpinan kepala sekolah dalam mengkoordinasikan pendidikan inklusif adalah sebagai berikut: (1) Kepala sekolah memiliki peran penting dalam meningkatkan praktik belajar mengajar di kelas reguler dan kelas inklusif, (2) Kepala sekolah memiliki peran penting dalam memberikan umpan balik terhadap penguasaan kompetensi guru yang bertindak sebagai penggerak di sekolah, (3) Seorang kepala sekolah dapat menjadi contoh teladan dan agen perubahan dalam sistem pendidikan, (4) Untuk mendukung pengembangan profesional guru, baik guru reguler maupun guru pendamping khusus, seorang kepala sekolah mempunyai langkah strategi, dan (5) Untuk menciptakan budaya perbaikan berkelanjutan dalam kualitas pengajaran di sebuah sekolah, kepala sekolah mempunyai beberapa tindakan.

Pembahasan

Data Pendidik

Berdasarkan hasil penelitian mengenai data tenaga pendidik bahwa di SD Negeri Cikampek Pusaka I tidak terdapat guru pendamping khusus dalam menangani siswa berkebutuhan khusus. Data tenaga pendidik yang paling banyak adalah guru kelas sebanyak 9 orang guru. Mengatasi permasalahan mengenai tidak adanya guru pendamping khusus di sekolah ini, maka kepala sekolah mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait (para stakeholders) untuk menghadapi tantangan pergeseran dari sekolah khusus menuju pendidikan inklusif karena hal ini merupakan sistem pendidikan yang diterapkan di setiap sekolah sebagai wadah untuk menerapkan kebijakan dan praktik pendidikan. Kekuatan kepemimpinan instruksional kepala sekolah dalam mengkoordinasikan pendidikan inklusif seharusnya menyusun strategi pengajaran dan praktik kelas yang diorganisasikan ke guru-guru dengan mengakomodasi siswa dengan gangguan belajar dan perilaku yang kompleks di dalam kelas reguler (Kaur et al., 2016). Hal ini menjelaskan bahwa, kepala sekolah memberikan koordinasi kepada guru melakukan upaya sadar dengan sumber daya yang terbatas untuk membuat strategi pembelajaran guna membantu siswa berkebutuhan khusus menyesuaikan diri di kelas umum. Strategi tersebut menggunakan lima prinsip inklusi, yaitu (1) Keragaman di kelas memperkaya dan memperkuat pendidikan, (2) Kurikulum berbasis kekuatan dan individualisasi, (3) Keterlibatan peserta didik dan organisasi siswa, (4) Terlibat dengan Keterlibatan semua pemangku kepentingan, dan (5) Guru pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif membutuhkan komitmen, pengetahuan dan keterampilan praktis (Arriani et al., 2021). Selanjutnya kepemimpinan instruksional harus dibangun dan diberlakukan dalam konteks kebijakan pendidikan dan dinamika kebijakan untuk menelaah dan menemukan informasi pengetahuan/konsep baru, teknik baru, metode baru dan menyelidiki pola hubungan antar unsur konsep pendidikan (reguler dan inklusif) dalam menghindarkan kesenjangan yang terjadi pada pendidikan (Arar, Selahattin Turan, Abdellatif Sellami, & Mahfouz, 2024).

Data Siswa Berdasarkan Tingkat Kelas dan Jenis Kelamin (Termasuk Siswa Berkebutuhan Khusus)

Data ini memberikan gambaran yang jelas tentang jumlah dan distribusi siswa di sekolah, yang dapat membantu dalam perencanaan akademik dan operasional sekolah. Perencanaan akademik dan operasional sekolah seperti: pengelolaan rombongan belajar, penjadwalan guru per kelas, alokasi sumber daya, dan perencanaan kegiatan pembelajaran diorganisasikan oleh kepala sekolah yang bertugas sebagai kepemimpinan instruksional yang merupakan gaya kepemimpinan yang berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran di sekolah. Hasil penelitian yang relevan menunjukkan bahwa dampak kepala sekolah dalam perencanaan akademik terhadap siswa secara konsisten bersifat positif yang memberikan makna secara praktis dan berdampak lebih besar kepada sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah yang berfungsi baik akan berpengaruh pada peningkatan kekuatan kepemimpinan instruksional dengan mengacu kepada pencapaian keberhasilan yang bisa diidentifikasi (Leithwood, 2016).

Pencapaian keberhasilan kepemimpinan instruksional kepala sekolah pada kegiatan akademik dalam mengkoordinasikan pendidikan inklusif siswa berkebutuhan khusus yang terdiri dari: tingkat kelas 1A berjenis kelamin perempuan dengan kelompok tuna wicara, tingkat kelas 4A berjenis kelamin laki-laki dengan kelompok autisme dan berjenis kelamin perempuan dengan kelompok slow learner, tingkat kelas 4B berjenis kelamin laki-laki dengan kelompok tuna wicara, tingkat kelas 5A berjenis kelamin perempuan dengan kelompok disgrafia, dan tingkat kelas 5B berjenis kelamin laki-laki dengan kelompok disabilitas fisik. Kelompok pendidikan inklusif yang dikelola kepala sekolah untuk mengurangi kesenjangan dan hambatan untuk mengakses kegiatan pembelajaran bagi siswa inklusi dapat diatasi dengan kekuatan kepemimpinan instruksional kepala sekolah dengan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dan disesuaikan dengan kurikulum, sehingga siswa inklusi dapat menerima layanan pendidikan yang mengarah pada masyarakat yang setara dengan siswa umumnya lainnya (Shaeffer, 2019).

Data Berdasarkan Kelompok Usia

Data ini penting untuk merencanakan kurikulum dan aktivitas yang sesuai dengan usia siswa serta memastikan bahwa sumber daya pendidikan yang diberikan sesuai dengan kelompok usia yang dilayani. 1. Mayoritas Siswa Berada di Rentang Usia 6 -12 Tahun: Sebagian besar siswa (557 siswa) berada dalam rentang usia 6 -12 tahun, yang menunjukkan bahwa sekolah ini utamanya melayani jenjang pendidikan dasar (SD, 2. Jumlah Siswa di Rentang Usia 13 -15 Tahun: Ada 17 siswa yang berusia antara 13-15 tahun. Ini mungkin mencakup siswa yang berada di tingkat akhir pendidikan dasar atau yang mengulang kelas, 3. Tidak Ada Siswa di Rentang Usia Lain: Tidak ada siswa yang berusia di bawah 6 tahun atau di atas 15 tahun, menunjukkan bahwa sekolah ini tidak memiliki program untuk anak-anak prasekolah, 4. Perbandingan Laki-laki dan Perempuan: Jumlah siswa laki-laki (297) sedikit lebih banyak daripada siswa perempuan (277), tetapi perbedaannya tidak signifikan, dan 5. Kesesuaian Usia dengan Tingkat Pendidikan: Sebagian besar siswa berada dalam rentang usia yang sesuai dengan tingkat pendidikan dasar, menunjukkan bahwa usia siswa sebagian besar sesuai dengan tingkat kelas.

Usia siswa inklusif yang ada di SD Negeri Cikampek Pusaka I berkisar antara usia 9 tahun sampai usia 13 tahun. Usia siswa inklusif tersebut terdapat pada rentang usia 6 – 12 tahun dan rentang usia 13 – 15 tahun yang dirinci pada tabel 4 di bawah:

Tabel 4. Kelompok Usia Siswa Inklusif

Nama	Kelas	Tanggal Lahir
Natasya Aulia Santika	5A	18 Desember 2011 (13 tahun)
Reisya Febriyani Putri	1A	23 Februari 2015 (9 tahun)
Muhamad Kamil Mustofa	4A	18 April 2013 (11 tahun)
Nisa Halimatussadiyah	4A	19 Januari 2013 (11 tahun)
Hanif Alfian Mubarak	5B	07 Februari 2013 (11 tahun)
Asep Mulayana	4B	24 Maret 2013 (11 tahun)

Data pada tabel 4 di atas, menjelaskan bahwa siswa inklusif yang berada pada kelas 1A yang berusia 9 tahun tidak sesuai dengan tingkat usia siswa regular. Berdasarkan Permendikbud Ristek Nomor 1 tahun 2021 menyatakan bahwa aturan batas usia PPDB tahun 2024 adalah usia masuk SD kelas 1 berusia 7 tahun yang diprioritaskan, paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan (Permendikbud, 2021). Karena siswa kelas 1A tersebut termasuk kategori inklusif, maka diperbolehkan untuk ikut mendapatkan pendidikan yang layak di SD Negeri Cikampek Pusaka I. Pendidikan inklusif merupakan pendekatan dalam pendidikan yang berfokus pada penyertaan semua siswa karena keterbatasan fisik, intelektual, social-emosional, dan perbedaan lainnya. Penjelasan pendidikan inklusif adalah 1. Akses yang Setara: Pendidikan inklusif memastikan semua siswa memiliki akses yang sama ke pendidikan berkualitas, tanpa diskriminasi berdasarkan kemampuan atau latar belakang, 2. Lingkungan Belajar yang Beragam: Lingkungan belajar inklusif merangkul keragaman dan mendorong semua siswa untuk belajar bersama. Hal ini meningkatkan toleransi dan pengertian di antara siswa, 3. Penyesuaian Kurikulum: Dalam pendidikan inklusif, kurikulum sering kali disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan individu siswa. Ini bisa melibatkan penyesuaian metode pengajaran, materi, atau bahkan penilaian, 4. Pengembangan Sosial-Emosional: Pendidikan inklusif menekankan pentingnya pengembangan sosial dan emosional, memastikan semua siswa merasa diterima dan dihargai dalam komunitas sekolah. Keempat pendekatan di atas, kepala sekolah mengkoordinasikan dengan tepat dan jelas kepada guru pendamping dengan menerapkan prinsip inklusivitas dengan memfasilitasi berbagai usia dalam satu kelas dan memberikan kesempatan bagi semua siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya (Yunita, Suneki, & Wakhyudin, 2019).

Kekuatan Kepemimpinan Instruksional Kepala sekolah

Kepala sekolah memiliki peran penting dalam meningkatkan praktik belajar mengajar di kelas reguler dan kelas inklusif dengan cara : Memberikan Dukungan dan Sumber Daya, Mendorong Kolaborasi, Monitoring dan Evaluasi, dan Memfasilitasi Komunikasi. Melalui keterlibatan aktif dan dukungan kepala sekolah, praktik belajar mengajar di kelas reguler dan inklusif dapat ditingkatkan untuk mendukung keberhasilan semua siswa. Penelitian relevan mengemukakan bahwa, pemimpin di sekolah mencakup praktik memimpin dan mengadvokasi perubahan sosial yang positif, kesetaraan, dan keadilan untuk mengatasi dan memperbaiki ketidaksetaraan sistemik, diskriminasi, dan ketidakadilan yang mempengaruhi kelompok yang terpinggirkan dan kurang beruntung seperti siswa inklusif. Kekuatan kepemimpinan kepala sekolah dalam mengkoordinasikan pendidikan inklusif adalah aktif mempromosikan inklusivitas, keberagaman, dan kesempatan yang sama bagi semua individu. Praktik kepemimpinan kepala sekolah untuk memperkuat dalam menghadapi tantangan adalah dengan memastikan suasana belajar yang adil di kelas dan hambatan yang ada dijadikan pertimbangan untuk membuat kebijakan pendidikan (Kavrayıcı, 2024).

Kepala sekolah memiliki peran penting dalam memberikan umpan balik terhadap penguasaan kompetensi guru. Langkah umpan balik yaitu : (1) Observasi langsung: Hal ini memungkinkan kepala sekolah untuk melihat secara langsung bagaimana guru mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam praktik pembelajaran sehari-hari, (2) Evaluasi hasil pembelajaran: Kepala sekolah dapat mengevaluasi hasil pembelajaran yang dicapai oleh siswa yang diajar oleh guru tersebut. Dengan meninjau hasil pembelajaran, kepala sekolah dapat menilai sejauh mana guru mampu menerapkan kompetensinya dengan efektif, (3) Pengamatan terhadap interaksi sosial: Selain kinerja dalam pembelajaran, kepala sekolah juga dapat mengamati interaksi sosial antara guru dan siswa, serta antara guru dengan staf lainnya. Kompetensi interpersonal dan kemampuan berkomunikasi guru juga penting untuk dinilai, (4) Menggunakan instrumen penilaian: Kepala sekolah dapat menggunakan instrumen penilaian kinerja guru yang telah disusun sebelumnya untuk memberikan umpan balik yang terstruktur dan komprehensif. Instrumen ini dapat mencakup berbagai aspek kompetensi guru, mulai dari keterampilan mengajar hingga kemampuan manajerial, (5) Pengembangan profesional: Kepala sekolah juga dapat memfasilitasi program pengembangan profesional bagi guru untuk meningkatkan penguasaan kompetensi mereka. Ini dapat berupa pelatihan, lokakarya, atau program pengembangan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan individu maupun kebutuhan sekolah secara keseluruhan dan (6) Pengakuan atas prestasi: Kepala sekolah dapat memberikan pengakuan atas prestasi dan kontribusi yang telah dilakukan oleh guru dalam meningkatkan penguasaan kompetensi mereka. Penghargaan seperti apresiasi verbal, sertifikat penghargaan, atau pengakuan dalam rapat sekolah dapat menjadi bentuk pengakuan yang memotivasi.

Kepala sekolah mendukung pengembangan profesional guru (reguler dan guru pendamping khusus) dengan cara: (1) Menyediakan Pelatihan Berkala: Kepala sekolah dapat menyelenggarakan pelatihan berkala baik yang diselenggarakan secara internal oleh sekolah maupun eksternal dengan mengundang para ahli atau institusi terkait untuk memberikan wawasan dan keterampilan baru kepada guru, (2) Menyediakan Sumber Daya: Pastikan guru memiliki akses ke sumber daya yang diperlukan, baik itu materi pembelajaran terbaru, buku, jurnal, atau perangkat lunak pendidikan yang relevan. Kepala sekolah juga dapat menyediakan akses ke fasilitas laboratorium, perpustakaan, atau akses internet yang memadai, (3) Mengadakan Sesi Kolaborasi: Memfasilitasi sesi kolaborasi antara guru-guru di sekolah untuk berbagi pengalaman terbaik, strategi pengajaran yang efektif, dan mendiskusikan masalah yang dihadapi dalam pembelajaran, (4) Mendorong Partisipasi dalam Kegiatan Pengembangan Profesional: Menggalakkan guru untuk berpartisipasi dalam konferensi, seminar, workshop, dan kursus yang relevan dengan bidang mereka. (5) Kepala sekolah dapat memberikan dukungan finansial atau waktu tambahan untuk partisipasi ini, (6) Memberikan Umpan Balik Konstruktif: Memberikan umpan balik secara teratur kepada guru tentang kinerja mereka, baik melalui evaluasi formal maupun diskusi informal. Umpan balik ini harus bersifat konstruktif dan mendukung

pertumbuhan profesional guru, (7) Membangun Rencana Pengembangan Profesional Individual: Berkolaborasi dengan setiap guru untuk merencanakan dan memantau perkembangan mereka dalam mencapai tujuan pengembangan profesional mereka. Rencana ini harus mencakup pengembangan keterampilan, pembaruan kurikulum, dan pencapaian target kinerja. (8) Menghargai Prestasi Guru: Memberikan pengakuan dan penghargaan kepada guru yang mencapai prestasi luar biasa dalam pengembangan profesional mereka, baik melalui penghargaan formal maupun pengakuan publik lainnya. (9) Menyediakan Dukungan Emosional: Selain dukungan profesional, kepala sekolah juga harus memastikan adanya dukungan emosional bagi guru-guru, terutama dalam menghadapi tantangan dan tekanan dalam profesi mereka.

Kepala sekolah menciptakan budaya perbaikan berkelanjutan dalam kualitas pengajaran, melalui tindakan sebagai berikut: (1) Membangun Visi dan Misi yang Jelas: Kepala sekolah perlu mengkomunikasikan visidan misi sekolah yang menekankan pentingnya kualitas pengajaran yang tinggi dan komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan. (2) Memberikan Dukungan dan Sumber Daya: Kepala sekolah harus menyediakan dukungan dan sumber daya yang diperlukan kepada para guru untuk mengembangkan keterampilan mereka dalam pengajaran yang efektif. Ini termasuk pelatihan, bahan ajar, dan waktu untuk kolaborasi, (3) Mendorong Kolaborasi: Kepala sekolah dapat memfasilitasi kolaborasi antar guru melalui pertemuan rutin, workshop, atau forum online. Kolaborasi memungkinkan para guru untuk saling belajar satu sama lain, berbagi praktik terbaik, dan mengidentifikasi area perbaikan. Memberikan Umpan Balik Konstruktif: Kepala sekolah harus memastikan bahwa sistem umpan balik yang efektif ada di tempat, baik dari kepala sekolah sendiri, sesama guru, atau bahkan siswa. Umpan balik ini harus didasarkan pada data dan observasi yang jelas, serta diarahkan pada perbaikan yang konkret dan dapat diimplementasikan. (4) Mendorong Refleksi dan Pembelajaran Mandiri: Kepala sekolah dapat mendorong para guru untuk terlibat dalam refleksi mandiri tentang praktik pengajaran mereka sendiri. Ini dapat dilakukan melalui jurnal pengajaran, pengamatan kelas sendiri, atau partisipasi dalam program pengembangan profesional. (5) Menggunakan Data untuk Pengambilan Keputusan: Kepala sekolah harus mendorong penggunaan data dalam mengidentifikasi tren dan pola dalam kinerja siswa serta efektivitas pengajaran. Data ini dapat digunakan untuk mengarahkan upaya perbaikan dan intervensi yang tepat.

Memperkuat kepemimpinan instruksional kepala sekolah dalam mengkoordinasikan pendidikan inklusif dengan memberdayakan guru-guru dan memberikan tanggung jawab serta kesempatan untuk memimpin inisiatif perbaikan. Menyediakan Model Peran Kepala sekolah menjadi contoh yang baik dengan memperlihatkan komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan dalam kualitas pengajaran. Hal ini dapat dilakukan melalui partisipasi aktif dalam program pengembangan profesional, kolaborasi dengan guru, dan mendorong budaya pembelajaran terus-menerus di sekolah. Dengan mengambil langkah-langkah ini, kepala sekolah dapat menciptakan budaya perbaikan berkelanjutan yang mendukung pengembangan profesional para guru dan meningkatkan kualitas pengajaran secara keseluruhan di sekolah. Penelitian terkait menyatakan bahwa, kekuatan kepemimpinan adalah dengan mengidentifikasi semua variabel yang relevan dengan sekolah yang mempunyai kemampuan kuat dengan memberikan kontribusi yang signifikan dan berpengaruh langsung terhadap pembelajaran siswa (Leithwood & Sun, 2018).

SIMPULAN

Kepemimpinan instruksional kepala sekolah yang efektif merupakan kunci utama dalam mengkoordinasikan pendidikan inklusif untuk mengatasi keterbatasan sumber daya dalam mencapai keberhasilan dengan memberikan kontribusi kepada guru dalam upaya sadar dengan membangun dan memberlakukan kebijakan pendidikan untuk menelaah konsep pendidikan inklusif untuk menghindari kesenjangan yang terjadi pada pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arar, K., Selahattin Turan, S. G., Abdellatif Sellami, A., & Mahfouz, J. (2024). *Educational Leadership and Administration in the Middle East and North Africa*. https://doi.org/10.4324_9781003334835
- Arriani, F., Agustawati, Rizki, A., Ranti, W., Wibowo, S., Tulalessy, C., & Herawati, F. (2021). Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif. *Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi*, 26–30.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Brazer, S. D., & Bauer, S. C. (2013). Preparing Instructional Leaders: A Model. *Educational Administration Quarterly*, 49(4), 645–684. <https://doi.org/10.1177/0013161X13478977>
- Hallinger, P. (2018). Bringing context out of the shadows of leadership. *Educational Management Administration and Leadership*, 46(1), 5–24. <https://doi.org/10.1177/1741143216670652>
- Jaya, A. (2023). SDN Cikampek Pusaka 1 Gelar Kenaikan , Pelulusan dan Festival Gelar Karya P5. Retrieved from Berita 7 TV website: <https://berita7.net/berita/detail/sdn-cikampek-pusaka-1-gelar-kenaikan-pelulusan-dan-festival-gelar-karya-p5>
- Kaur, A., Noman, M., & Awang-Hashim, R. (2016). Exploring strategies of teaching and classroom practices in response to challenges of inclusion in a Thai school: A case study. *International Journal of Inclusive Education*, 20(5), 474–485. <https://doi.org/10.1080/13603116.2015.1090489>
- Kavrayıcı, C. (2024). Social Justice Leadership in School Settings: A Qualitative Study. *Research in Educational Administration and Leadership*, 9(2), 232–266. <https://doi.org/10.30828/real.1431311>
- Kemendikbudristek. (2022). Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif. Retrieved from Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi website: <https://kurikulum.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2022/08/Panduan-Pelaksanaan-Pendidikan-Inklusif.pdf>
- Leithwood, K. (2016). Department-Head Leadership for School Improvement. *Leadership and Policy in Schools*, 15(2), 117–140. <https://doi.org/10.1080/15700763.2015.1044538>
- Leithwood, K., & Sun, J. (2018). Academic culture: a promising mediator of school leaders' influence on student learning. *Journal of Educational Administration*, 56(3), 350–363. <https://doi.org/10.1108/JEA-01-2017-0009>
- Musneckiene, E. (2020). Inclusive education in the arts: challenges, practices and experiences in Lithuania. *JETEN (Journal of the European Teacher Education Network)*, 15(2020), 18–29.
- Permendikbud. (2021). Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021. *Permendikbud*, 1–25.
- Ramadhana, R. (2024). Hambatan Mencapai Pendidikan Inklusi di Indonesia Mengatasi Hambatan untuk Mencapai Pendidikan Inklusi. Retrieved from Berita Kampus website: <https://bentaracampus.ac.id/hambatan-dan-sulitnya-mencapai-pendidikan-inklusi-di-indonesia/>
- Shaeffer, S. (2019). Inclusive education: a prerequisite for equity and social justice. *Asia Pacific Education Review*, 20(2), 181–192. <https://doi.org/10.1007/s12564-019-09598-w>
- Sumarni. (2019). Pengelolaan Pendidikan Inklusif di Madrasah. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 17(2), 148–161. <https://doi.org/10.32729/edukasi.v17i2.631>
- Sunardi, S., Nugroho, P. J., & Setiawan, S. (2019). Kepemimpinan Instruksional Kepala Sekolah. *Equity In Education Journal*, 1(1), 20–28. <https://doi.org/10.37304/eej.v1i1.1548>
- Widiyan, A. P., Sirisooksilp, S., & Narot, P. K. (2020). The development of instructional leadership scale of elementary school principals in Indonesia. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 19(12), 126–145. <https://doi.org/10.26803/ijlter.19.12.7>
- Yunita, E. I., Suneki, S., & Wakhyudin, H. (2019). Manajemen Pendidikan Inklusi dalam Proses

5990 *Kekuatan Kepemimpinan Instruksional Kepala Sekolah dalam Mengkoordinasikan Pendidikan Inklusif*
- Rismita, Connie Chairunnisa, Istaryatiningtias, Yoga Dwiputra
DOI : <https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i5.7638>

Pembelajaran dan Penanganan Guru Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus. *International Journal of Elementary Education*, 3(3), 267. <https://doi.org/10.23887/ijee.v3i3.19407>